



---

**ANALISIS PERKEMBANGAN RETRIBUSI PASAR DAERAH SEBAGAI SUMBER  
PEMBIAYAAN OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007-2011****Asep Tri Handoko** Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

---

---

**Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Diterima September 2012  
Disetujui September 2012  
Dipublikasikan November  
2012

*Key Words: Retribution  
Growth Market, Out-  
onomy Regional resources  
Income(PAD)*

---

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi pada Diskoperindag dan DPPKAD Kabupaten Pemalang dengan judul "Analisis Perkembangan Retribusi Pasar-Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011". Menganalisis perkembangan penerimaan retribusi terhadap sumber pembiayaan otonomi daerah yang diterapkan di Kabupaten Pemalang dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar. Tahap-tahap analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah: (1) mengidentifikasi perkembangan penerimaan retribusi pasar. (2) analisis efektivitas (3) analisis efisiensi (4) analisis pertumbuhan (5) analisis kontribusi. Hasil penelitian di kabupaten Pemalang menunjukkan (1) perkembangan penerimaan retribusi pasar daerah di Kabupaten Pemalang sudah efektif, mencapai efisiensi dan mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi (2) kontribusi retribusi pasar terhadap sumber pembiayaan otonomi daerah (PAD) dari tahun 2007 sampai tahun 2011 masih rendah/kecil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan dan kontribusi penerimaan retribusi pasar daerah di Kabupaten Pemalang masih kecil/rendah dan perlu ditingkatkan.

**Abstract**

This research is a type of research descriptions on Diskoperindag and DPPKAD Pemalang District with the title "Analysis of Growth Regional Market Retribution and contribution to regional outonomy expensed from 2007 to 2011". The purpose of this study was to analyze the development market retribution to areas adopted during the Pemalang District by referring to the Act. 28 of 2009 and Local Regulation No. 14 of 2007 on Market retribution. The stages of analysis used by the author in the study were: (1) identify the growth market acceptance retribution. (2) effectiveness analysis. (3) efficiency analysis (4) growth analysis. (5) analysis contribution. Results of research on distric Pemalang show. (1) the growth of market acceptance of user charges in district Pemalang been quite effective, reach out for and touch efisien and experience fluctuation growth. (2) retribution contribution to outonomy regional income (PAD) from 2007 to 2011 has quite low/small. The conclusion of this research is the growthand contribution of market acceptance in Pemalang district quite low and need to increase..

---

 Alamat korespondensi:  
Gedung C6 lantai 1, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229  
E-mail: [handokoasep@gmail.com](mailto:handokoasep@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan.

Menurut pendapat Abdullah & Alim (2004: 2) menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber penerimaan daerah Kabupaten Pemalang yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi. Retribusi itu merupakan harga dan suatu pelayanan langsung dari pemerintah daerah yang digunakan untuk menyediakan tempat pasar yang strategis. Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap pengguna sarana dan prasarana pasar. Sedangkan dari pihak masyarakat langsung dapat merasakan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang diberikan oleh pemerintah Daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Perkembangan Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah (PAD) di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011”.

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah perkembangan retribusi pasar daerah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2007-2011? (1) Bagaimanakah kontribusi retribusi pasar daerah sebagai sumber pembi-

ayaan otonomi daerah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2007-2011?

UU Nomor 12 Tahun 2008, yang dimaksud dengan otonomi daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dimana dalam hal ini daerah otonom diberi keluasaan yang penuh dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya sesuai potensi yang dimiliki.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari: (a) Hasil Pajak Daerah mempunyai pengertian negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan undang-undang yang digunakan guna membiayai pengeluaran daerah. (b) Hasil Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh hak langsung atau tidak langsung. (c) Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengolahan Daerah yang dipisahkan mempunyai pengertian suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah ini tidak tergolong pada sumber pendapatan murni daerah ataupun pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah

Retribusi daerah menurut Samudra Azhari (1995 :273) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan daerah dalam hal ini ada kekecualian tertentu, yaitu pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dianggap sebagai perusahaan yang tidak dimaksudkan sebagai retribusi daerah.

Retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu komponen retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar

adalah retribusi atas fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan oleh pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar. (Kesit, Bambang, 2005 : 135). Berdasarkan Perda Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai suatu tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman, los, kios dan bentuk lainnya yang dikelola pemerintah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Retribusi Pasar Sebagai salah satu sumber pendapatan retribusi daerah, pemerintah diharapkan dapat menggali potensi retribusi pasar semaksimal mungkin sebagai sumber keuangan penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar akan terjadi suatu perputaran uang yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Pematang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan retribusi pasar daerah melalui pencapaian tingkat efektivitas dari kegiatan perbandingan antara keluaran (*output*) yang direncanakan untuk dicapai dengan *output* yang benar-benar tercapai. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut maka dapat dikatakan semakin efektif pula organisasi atau perusahaan tersebut. Mengetahui seberapa efisiensi yang tercapai perbandingan antara biaya operasional pemungutan dan total penerimaan. Mengetahui pertumbuhan dari tahun 2007-2011 serta seberapa besar kontribusinya terhadap PAD.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan data hasil observasi dan dipaparkan secara sistematis dan fluktuatif sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan presentase yaitu data yang berwujud angka-angka, baik hasil perhitungan maupun pengukuran diproses dengan teknik deskriptif kuantitatif dengan presentase. Adapun analisis yang dipakai sebagai berikut ;

Hasil realisasinya dapat diketahui tingkat efektivitas dan Efisiensi dari pelaksanaan penerimaan retribusi pasar. Menurut Abdul Halim (2004: 64)

$$EFK = \frac{\text{Realisasi RP tahun ke-n}}{\text{target RP tahun ke-n}} \times 100\%$$

**Keterangan :**  
 EFK = Efektifitas  
 RP<sub>ke-n</sub> = Retribusi Pasar

$$EFS = \frac{\text{Biaya Pemungutan RP}}{\text{Pendapatan RP}} \times 100\%$$

**Keterangan :**  
 EFS = Efisiensi  
 RP = Retribusi Pasar

Untuk melihat pertumbuhan dari penerimaan retribusi pasar dengan membandingkan antara penerimaan retribusi pasar dengan penerimaan retribusi pasar tahun sebelumnya, menurut Dewi Patmawati<sup>1</sup> (1996: 36) dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{RP_{\text{thn}} - RP_{\text{thn-1}}}{RP_{\text{thn-1}}} \times 100\%$$

**P = Pertumbuhan**  
 RP<sub>thn</sub> = Retribusi Pasar  
 RP<sub>thn-1</sub> = Retribusi Pasar Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dapat memberikan gambaran tentang besarnya kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dengan rumusan sebagai berikut:

$$K = \frac{\text{Realisasi RP tahun ke - n}}{\text{Realisasi PAD tahun ke - n}} \times 100\%$$

**Keterangan :**  
 K = Kontribusi  
 RP = Retribusi Pasar  
 PAD = Pendapatan Asli Daerah

**HASIL**

**Tabel 1.** Analisis Efektivitas

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2007	2.650.388.000,00	2.703.242.000,00	101,99
2008	2.859.752.000,00	2.970.141.344,00	103,86
2009	2.876.566.340,00	3.133.300.210,00	108,92
2010	3.332.412.850,00	3.435.026.300,00	103,08
2011	3.554.510.875,00	3.569.582.275,00	100,42
Rata-rata			103,65

Sumber ; Diskoperindag Kab. Pemalang

Perhitungan Efektivitas

$$EFK = \frac{\text{Realisasi RP tahun ke-n}}{\text{target RP tahun ke-n}} \times 100\%$$

1. Tahun 2007	$= \frac{2.703.242.000}{2.650.388.000} \times 100\%$	= 101,99%
2. Tahun 2008	$= \frac{2.970.141.344}{2.859.752.000} \times 100\%$	= 103,86%
3. Tahun 2009	$= \frac{3.133.300.210}{2.876.566.340} \times 100\%$	= 108,92%
4. Tahun 2010	$= \frac{3.435.026.300}{3.332.412.850} \times 100\%$	= 103,08%
5. Tahun 2011	$= \frac{3.569.582.275}{3.554.510.875} \times 100\%$	= 100,42%

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar tahun anggaran 2007–2011 mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi target penerimaan retribusi pasar. Tingkat efektivitas tersebut dikarenakan adanya factor eksternal maupun internal. internal dipegaruhi oleh dinas pengelolaan pasar malalui berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi seperti ditingkatkannya kedisiplinan dan pengawasan petugas di lapangan dan dari factor eksternal seperti kesadaran para pedagang di dalam pasar untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pemalang.

**Tabel 2.** Analisis Efisiensi

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi Penerimaan	Efisiensi (%)
2007	120.519.400,00	2.703.242.000,00	4,46
2008	105.500.300,00	2.970.141.344,00	3,55
2009	170.063.000,00	3.133.300.210,00	5,42
2010	150.100.350,00	3.435.026.300,00	4,36
2011	215.500.350,00	3.569.582.275,00	6,04
Rata-rata			4,75

Perhitungan Efisiensi

$$EFS = \frac{\text{Biaya Pemungutan RP}}{\text{Pendapatan RP}} \times 100\%$$

1. Tahun 2007	$= \frac{120.519.400}{2.703.242.000} \times 100\%$	= 4,46%
2. Tahun 2008	$= \frac{105.500.300}{2.970.141.344} \times 100\%$	= 3,35%
3. Tahun 2009	$= \frac{170.063.000}{3.133.300.210} \times 100\%$	= 5,42%
4. Tahun 2010	$= \frac{150.100.350}{3.435.026.300} \times 100\%$	= 4,36%
5. Tahun 2011	$= \frac{215.500.350}{3.569.582.275} \times 100\%$	= 6,04%

Sumber ; Diskoperindag Kab. Pemalang

Berdasarkan Tabel 2. di atas diketahui penerimaan retribusi pasar daerah berjalan efisien dengan nilai rata-rata sebesar 4,75%. Pencapaian efisien diindikasikan adanya keberhasilan kinerja dinas pengelolaan pasar daerah dalam memungut retribusi. Dimana biaya operasional yang digunakan untuk memungut retribusi tidak lebih besar 5% dari total penerimaan.

**Tabel 3.** Analisis Pertumbuhan

Pertumbuhan Retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Pemalang

Tahun	Realisasi Penerimaan	Pertumbuhan (%)
2007	2.703.242.000,00	-
2008	2.970.141.344,00	9,87
2009	3.133.300.210,00	5,49
2010	3.435.026.300,00	9,63
2011	3.569.582.275,00	3,92

Perhitungan Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar:

$$p = \frac{RP_{\text{thn}} - RP_{\text{thn}-1}}{RP_{\text{thn}-1}} \times 100\%$$

1. Tahun 2007/2008	$= \frac{2.970.141.344 - 2.703.242.000}{2.703.242.000} \times 100\%$	= 9,87%
2. Tahun 2008/2009	$= \frac{3.133.300.210 - 2.970.141.344}{2.970.141.344} \times 100\%$	= 5,49%
3. Tahun 2009/2010	$= \frac{3.435.026.300 - 3.133.300.210}{3.133.300.210} \times 100\%$	= 9,63%
4. Tahun 2010/2011	$= \frac{3.569.582.275 - 3.435.026.300}{3.435.026.300} \times 100\%$	= 3,92%

Sumber ; Diskoperindag Kab. Pemalang

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2007 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 2.703.242.000,00 Tahun 2008 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.2.970.141.344,00 dengan pertumbuhan 9,87% Tahun 2009 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.3.133.300.210,00 dengan pertumbuhan

5,49% Tahun 2010 penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.3.435.026.300,00 dengan pertumbuhan 9,63%. Dan pada tahun 2011 penerimaan retribusi sebesar Rp.3.569.582.275,00 dengan pertumbuhan 3,92%. Bila dilihat pertumbuhan tahun 2008 sangat besar, hal ini disebabkan karena adanya upaya intensifikasi berupa kenaikan dalam penetapan target retribusi, hal ini dikarenakan ekspektasi pemerintah yang tinggi, di mana tahun 2008 pemerintah banyak melakukan upaya ekstensifikasi pendapatan.

**Tabel 4.** Analisis Kontribusi

Kontribusi Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Realisasi PAD	(%)
2007	2.703.242.000,00	55.835.339.008,00	4,84
2008	2.970.141.344,00	66.737.900.620,00	4,45
2009	3.133.300.210,00	81.819.350.500,00	3,83
2010	3.435.026.300,00	76.441.260.350,00	4,49
2011	3.569.582.275,00	71.726.260.500,00	4,98
Rata-rata			4,48

Sumber ; Diskoperindag Kab. Pemalang

Perhitungan Kontribusi:

$$K = \frac{\text{Realisasi RP tahun ke - n}}{\text{Realisasi PAD tahun ke - n}} \times 100\%$$

1. Tahun 2007 =  $\frac{2.703.242.000}{55.835.339.008} \times 100\% = 4,84\%$
2. Tahun 2008 =  $\frac{2.970.141.344}{66.737.900.620} \times 100\% = 4,45\%$
3. Tahun 2009 =  $\frac{3.133.300.210}{81.819.350.500} \times 100\% = 3,83\%$
4. Tahun 2010 =  $\frac{3.435.026.300}{76.441.260.350} \times 100\% = 4,49\%$
5. Tahun 2011 =  $\frac{3.569.582.275}{71.726.260.500} \times 100\% = 4,98\%$

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa dari tahun 2007–2011 kontribusi penerimaan retribusi pasar-pasar daerah di Kabupaten Pemalang terhadap pendapatan asli daerah mengalami kestabilan. Berdasarkan hasil nilai kontribusi tersebut masih dikatakan rendah/kecil. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sebanding dengan peningkatan penerimaan retribusi pasar.

**PEMBAHASAN**

Realisasi penerimaan retribusi pasar Tahun Anggaran 2007–2011 mencapai target yang

ditetapkan bahkan melebihi target penerimaan retribusi pasar. Tingkat efektivitas tersebut dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal, internal karena ada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan oleh pemerintah. Upaya intensifikasi berupa peningkatan kedisiplinan dan pengawasan petugas di lapangan. Upaya ekstensifikasi berupa perbaikan fisik pasar seperti perluasan lahan pasar, penambahan kios, los dan toko. factor eksternal disebabkan kesadaran para pedagang di dalam pasar untuk membayar retribusi. Hal ini dikarenakan ketatnya peraturan daerah yang mengatur retribusi pasar, dimana penunggakan akan dikenakan beban 2% selama pelunasan.

Kinerja dinas pengelolaan pasar (UPP) Kab.Pemalang diindikasikan berhasil. Hal ini dilihat berdasarkan perhitungan efisiensi, dimana nilai rata-rata efisiensi sebesar 4,75%. Efisien dinyatakan berhasil berdasarkan biaya operasional dalam pemungutan retribusi pasar tidak lebih besar 5% dari total penerimaan.

Pada Tahun 2007/2008 pertumbuhan retribusi pasar sebesar 9,87%. Tahun 2008/2009 pertumbuhan penerimaan retribusi pasar sebesar 5,49% Tahun 2009/2010 pertumbuhan penerimaan retribusi pasar sebesar 9,63% dan tahun 2010/2011 pertumbuhan penerimaan retribusi sebesar 3,92%

Bila dilihat pertumbuhan tahun 2008 sangat besar, hal ini disebabkan karena adanya upaya intensifikasi berupa kenaikan dalam penetapan target retribusi, kenakan ini berdasarkan tingginya ekspektasi pemerintah di tahun 2008 di mana tahun 2007-2008 pemerintah banyak melakukan upaya ekstensifikasi seperti pendirian pasar baru dan perbaikan pasar-pasar lama. Pada tahun 2008 banyak wajib retribusi membayar tunggakan retribusi pasar Grosir dan pertokoan tahun 2007, sehingga pertumbuhannya naik dari tahun 2007-2008.

Pada tahun 2010/2011 mengalami pertumbuhan terendah, atau menurun dibanding periode sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh potensi pasar yang menurun akibat dari musim panen yang gagal yang sangat berpengaruh besar pada aktivitas pasar. Secara umum tinggi rendahnya pertumbuhan retribusi pasar lebih disebabkan pada penetapan target retribusi oleh pemerintah.

Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dirasa masih rendah/kecil. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sebanding dengan peningkatan penerimaan retribusi pasar.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Perkembangan retribusi pasar daerah di Kabupaten Pemalang selama periode tahun 2007-2011 sebagai berikut;

Realisasi penerimaan retribusi pasar daerah selalu mencapai target yang ditetapkan, dengan rata-rata pencapaian sebesar 103,65%. Keberhasilan pencapaian target dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor internal (dinas) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kedua, faktor eksternal disebabkan dari segi masyarakat dan dari segi ekonomi.

Efisiensi penerimaan retribusi pasar daerah dinyatakan berhasil dengan nilai rata-rata sebesar 4,75%. Pencapaian efisien mengindikasikan adanya keberhasilan kinerja dinas pengelolaan pasar daerah dalam memungut retribusi. Dimana biaya operasional yang digunakan untuk memungut retribusi tidak lebih besar 5% dari total penerimaan.

Pertumbuhan retribusi pasar daerah berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi pada periode tahun 2007/2008, sedangkan pertumbuhan terendah pada periode tahun 2010/2011. Pada umumnya tinggi rendahnya pertumbuhan dikarenakan ketidakstabilan penetapan target retribusi oleh pemerintah.

Retribusi pasar daerah sebagai sumber pembiayaan otoda selama periode tahun 2007-2011 kontribusinya masih rendah/kecil sesuai kriteria ukur kontribusi. Rata-rata kontribusi sebesar 4,48%, kondisi tersebut dikarenakan belum dioptimalkannya sisi penerimaan dari retribusi pasar daerah.

### Saran

Pemerintah harus memanfaatkan potensi-potensi penerimaan retribusi pasar melalui upaya ekstensifikasi pendapatan yang berupa pemberdayaan pasar-pasar di kecamatan yang tidak terdapat pasar daerah. Pemberdayaan tersebut berbentuk pengalihan status pasar desa yang terdapat di ibu kota kecamatan menjadi pasar daerah.

Pemerintah perlu melakukan upaya intensifikasi pendapatan yang berupa pengkajian kembali Perda yang berkaitan dengan pendapatan pasar, Upaya lain perlu adanya sosialisasi yang berkala dari pemerintah terhadap para wajib retribusi/pedagang, misalkan setelah melakukan pengkajian kembali peraturan daerah. Upaya tersebut akan berdampak kepercayaan masyarakat khususnya wajib retribusi terhadap pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Pemalang, *Pemalang Dalam Angka 2007-2011*.

Digdo, Heru Priyo, 2005, *Analisis Perkembangan Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 1994/1995 – 2003*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Diskoperindag Kab. Pemalang, *Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Pemalang TA 2007-2011*.

DPPKAD Kabupaten Pemalang, *Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang TA 2007-2011*.

Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.

Kuncoro, M, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga.

Peraturan Daerah Pemalang, 2007, *Perda Nomor 17 Tahun 2007, Retribusi Pelayanan Pasar*.

Prakoso, Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : UII Press.

Pramudito, Kelik. 2003, *Kontribusi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Tertentu Terhadap PAD di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1991-2000*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta.

Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Skripsi, 2011, *Petunjuk Penyusunan Skripsi Mahasiswa Progam Strata I*, Semarang : FE UNNES.

Undang Undang RI, 2004, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004*, Diambil 15 Januari 2011, dari <http://www.google.com>

Undang Undang RI, 2008, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintah Daerah*, Diunduh 01 Februari 2011, dari <http://www.google.com>

Undang Undang RI, 2009, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Diunduh 10 Februari 2011, dari

<http://www.google.com>

Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.